

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, pembiayaan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, infrastruktur senantiasa membutuhkan suatu sumber penerimaan yang bisa diandalkan. Keperluan ini sangat dibutuhkan oleh suatu daerah terutama pada saat berlakukannya dalam otonomi daerah Republik Indonesia, yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari 2001.

Keberadaan daerah otonom dituntut supaya bisa mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan menunjang pengeluaran dalam bentuk pembiayaan daerah otonom. Dari beberapa alternatif sumber penerimaan pendapatan yang akan dipungut oleh pemerintah. Menurut peraturan perundang-undangan mengenai peraturan pemerintahan tersebut dalam membuat ketetapan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah dapat dikembangkan menurut keberadaan daerah masing-masing.

Perlakuan pajak daerah dan retribusi sebagaimana berasal dari sumber pendapatan daerah pada hakikatnya bukan saja menjadi tugas-tugas

keperintahan yang dalam kegiatannya memungut dan menetapkan pajak namun pada umumnya sebagai anggota juga harus mengambil bagian dalam kepengurusan pemerintahan, beberapa anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam kebijakan peraturan perpajakan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat diharuskan untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, masyarakat wajib memahami ketentuan-ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas dan cermat supaya dapat melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab dalam membayar pajak.

Menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 memberikan kesempatan bagi pemerintah supaya bisa memungut macam-macam pajak daerah yang dianggap bisa memenuhi persyaratan, terkecuali ketujuh dari jenis pajak daerah yang sudah ditetapkan. ketentuan jenis pajak lainnya diharuskan bisa membantu proses pembangunan dalam daerah. Dengan tujuan untuk memberikan kebebasan pada daerah atau kota dalam mengatasi kondisi dan keadaan serta pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah untuk masa yang akan datang yang akan membuat pertumbuhan potensi pajak dan tetap memerhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.

Sumber penerimaan pendapatan daerah pada dasarnya tidak hanya diperuntukan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu tiap-tiap daerah diharuskan untuk mencari sumber penerimaan pendapatannya sendiri sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. yang menjadi sumber pendapatan daerah salah satunya ialah

pajak daerah, beberapa diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak parkir, bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak air bawah tanah.

Berdasarkan jenis-jenis pajak Daerah diatas yaitu yang menjadi topik pembahasan adalah pajak hiburan, sebagaimana pajak hiburan sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan penerimaan daerah, maka dalam melaksanakan pajak hiburan tersebut, Pemerintah Daerah yang melalui dinas pendapatan daerahnya harus memperhatikan mekanisme pajak hiburan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan pajak hiburan. Dinas Pendapatan Kota dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak hiburan bisa menjadi sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah daerah khususnya Kota Surabaya. Mengapa tidak, Surabaya termasuk kota wisata yang sekarang ini terdapat berbagai tempat hiburan seperti diskotik, pameran, tempat tontonan, permainan bilyar, pertunjukan kesenian, serta masih banyak yang lainnya. dengan adanya peristiwa yang seperti ini harusnya dapat menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. Apabila mekanisme pengenaan dan penghitungan pajaknya dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ditambah kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Penerimaan pajak hiburan merupakan kontribusi yang cukup mempengaruhi peningkatan jumlah Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya.

Awal untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Asli Daerah yang signifikan Pemerintah Daerah Kota Surabaya perlu menetapkan target-target yang harus dicapai pertahunnya. dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan, tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan dalam perolehan penerimaan dari pajak hiburan yang menyebabkan tidak terpenuhi target. Pencapaian atas pemenuhan target bisa terealisasi apabila adanya program-program yang tepat dalam upaya peningkatan Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya yang bermanfaat kedepannya bagi pemerintah dalam usaha perolehan pendapatan daerah. Selain itu, perlu adanya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang “ **MEKANISME PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak hiburan di kota Surabaya. Tujuan lain penulisan tugas akhir ini, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd) Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Tugas Akhir yang dibuat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama mengenai mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak hiburan dan

diharapkan penulis dapat memperoleh pengalaman berharga dari proses penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini.

1.3.2 Bagi Pemerintah

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Surabaya khususnya dinas pendapatan Daerah kota Surabaya untuk lebih meningkatkan pengawasan serta kinerja terhadap pelaksanaan perpajakan terutama pajak hiburan.

1.3.3 Bagi pihak Lain

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan contoh bagi mahasiswa yang akan melakukan observasi atau penulisan laporan tugas akhir selanjutnya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup penulisan tugas akhir ini menyajikan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas dan terstruktur. Maka penulis ingin membatasi permasalahan untuk mempermudah dalam pembahasan nantinya yaitu mengenai mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak hiburan di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini juga data yang diambil yaitu data yang sudah ada dari periode-periode sebelumnya, yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya tetapi dari pengumpulan data atau data yang sudah ada dan telah disusun.

1.5.2 Interview (Wawancara)

Interview yaitu penulis melakukan wawancara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada kepala bidang pendataan, penetapan dan keberatan tentang bagaimana mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.



